

Implementation of the village owned enterprise program in Sidomojo Village, Krian District, Sidoarjo regency

[Implementasi Program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo]

Kusnul Khuluqin Naini¹⁾, Lailul Mursyidah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Lailul Mursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze and describe the implementation of the BUMDes program in Sidomojo Village, Krian District, Sidoarjo Regency and the factors that support and hinder the implementation process of BUMDes implementation in Sidomojo Village. This research is a descriptive qualitative research using purposive sampling informant determination technique. Techniques for collecting data are interviews, observations, documentation and literature studies. The data analysis technique uses Miles and Huberman which consists of four components, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the socialization of BUMDes is carried out non-formally through advertisements, banners and posters. And there are still obstacles in human resources, namely the incomplete management of BUMDes. And there is a need for restructuring related to BUMDes management. And in its implementation, BUMDes is constrained by the corona virus, thus limiting the scope of socialization related to BUMDes to the public.*

Keywords – Public Policy, Policy Implementation, BUMDes Program (Village Owned Enterprise)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi program BUMDes di Desa Sidomojo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses pelaksanaan implementasi BUMDes di Desa Sidomojo tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik penentuan informan purposive sampling. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan studi Pustaka. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi BUMDes dilakukan secara non formal melalui iklan, banner dan poster. Serta masih terdapat kendala dalam sumber daya manusia, yaitu kurang lengkapnya pengurus BUMDes. Dan perlu adanya restrukturisasi terkait pengurus BUMDes. Serta dalam pelaksanaannya, BUMDes terkendala oleh virus corona sehingga membatasi ruang lingkup sosialisasi terkait BUMDes kepada masyarakat.

Kata Kunci – Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

I. PENDAHULUAN

Pengembangan desa diperlukan untuk memajukan ekonomi desa. Dalam membantu pengembangan desa maka pemerintah membuat peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) [1]. Dimana BUMDes tersebut dapat menjadi salah satu alat yang dapat menggali potensi dan memajukan suatu desa. Pendirian BUMDes pada saat ini harus dilakukan, karena dapat meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perokonomian masyarakat [2].

Pendirian BUMDes terdapat beberapa tahapan : Pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes. Selanjutnya yang kedua, diadakan pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabata. Ketiga, mulai dilakukannya monitoring serta evaluasi, Kemudian, yang terakhir dilaksanakan pelaporan pertanggungjawaban oleh pengelola. Dalam kegiatan harian, maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta harus sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDes [3]

BUMDes merupakan badan usaha baik seluruh atau sebagian modalnya dikuasai oleh desa. Desa dapat menyertakan modalnya secara langsung dalam upaya mengelola aset untuk memberikan jasa dan layanan serta usaha yang lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat desa. Di tahun 2021 sebanyak 51.134 BUMDes di Indonesia telah memanfaatkan Dana Desa yang nantinya akan dijadikan modal pendirian BUMDes. Sehingga, setiap tahunnya pendirian BUMDes yang ada di Indonesia ini jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Tabel di bawah ini mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan angka pada pendirian BUMDes di Indonesia dari tahun 2016-2021 :

Tabel 1. Data BUMDes Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah/Unit
1.	2016	18.446
2.	2017	39.149
3.	2018	45.549
4.	2019	50.199
5.	2020	57.266
6.	2021	57.273

Sumber : Kemendes (2022)

Berdasarkan tabel 1, jumlah BUMDes dari tahun 2014 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan BUMDes dengan selisih kurang lebih 7.000 BUMDes. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki 164 BUMDes yang hingga saat ini masih berjalan. Jumlah BUMDes yang ada di Sidoarjo terbilang masih rendah. Karena pada tahun 2019 tersebut Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi ke-20 dalam jumlah BUMDesnya [4].

Menurut Wijaya dan Sari (2019) *“BUMDes is projected to be a pillar of village economy which function as a commercial institution in generating economic benefits and at the same time as a social institution to overcome various socio-economic problems”* (BUMDes diproyeksikan menjadi pilar ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga komersial dalam menghasilkan manfaat ekonomi dan sekaligus sebagai lembaga sosial untuk mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi) [5].

Pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Kabupaten Sidoarjo berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2009, mengenai prosedur dan pengelolaan BUMDes yang saat ini digantikan oleh Nomor 15 Tahun 2019 mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Serta, sebagian desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki BUMDes, baik yang beroperasi aktif maupun pasif [6]

Menurut BPS pada radarsidoarjo.id menunjukkan adanya peningkatan jumlah BUMDes yang ada di Sidoarjo seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. BUMDes di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Jumlah
2019	139
2020	179
2021	229

Sumber : radarsidoarjo.id (2022)

Menurut radarsidoarjo.jawapos.com, meningkatnya angka BUMDes tersebut dikarenakan adanya penerapan Kebijakan BUMDes di Kabupaten Sidoarjo yang membuat Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Desa untuk mendirikan BUMDes pada setiap Desanya. Di Kecamatan Krian sendiri saat ini terdapat 19 BUMDes. Salah satu desa yang memiliki BUMDes di Kecamatan Krian yaitu Desa Sidomojo. BUMDes di desa ini bergerak dalam penyewaan ruko, *brokering/chanting*, TPS (tempat pembuangan sampah) dan simpan pinjam.

Sebanyak 7 (tujuh) ruko di Desa Sidomojo tersebut disewakan. BUMDes di Desa Sidomojo "makmur jaya" sudah berdiri sejak tahun 2016 [7].

Dimulai dari 2016 BUMDes masih melakukan kegiatan simpan pinjam. Kemudian ditahun 2017 hingga 2018, BUMDes mulai membangun ruko untuk disewakan. Akan tetapi, ruko yang dibangun tersebut sepi peminat dan tidak berjalan secara maksimal. Karena kebanyakan dari penyewa ruko tersebut merasa jika penjualan mereka tidak memberikan keuntungan. Lalu dari perangkat desa sendiri kurang memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat yang tinggal di luar Desa Sidomojo tidak mengerti jika ruko tersebut disewakan dan merupakan kegiatan BUMDes Makmur Jaya.

Gambar 1. Ruko di Desa Sidomojo
Sumber : Hasil Oleh Penulis (2022)



Pada gambar 1, menunjukkan jika benar di Desa Sidomojo menyewakan ruko dalam melakukan kegiatan BUMDes. Dapat dilihat pada gambar tersebut, jika ruko telah dibangun dengan baik dan memiliki halaman yang cukup luas. Desa Sidomojo mendirikan BUMDes dengan cara bertahap, setiap tahun BUMDes tersebut melakukan evaluasi untuk mencari atau memikirkan banyak inovasi baru.

Selain itu, minimnya pengetahuan perangkat desa di lokasi tersebut menjadi salah satu faktor kegiatan sosialisasi kurang berjalan dengan baik. Serta kurangnya sumber daya manusia seperti pengurus dan anggota BUMDes yang hingga saat ini masih belum ada pengurus tetap, sehingga kurang bisa merangkul masyarakat untuk ikut dan berperan aktif dalam setiap proses pelaksanaan BUMDes tersebut. Dalam menganalisis pelaksanaan BUMDes dengan teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber daya dan komunikasi selalu menjadi hal utama dalam pelaksanaan suatu program. Seperti pada penelitian terdahulu Happy Liow, Florence D.J. Lengkong dan Novie Palar (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan, bahwa permasalahan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola badan usaha, serta kurangnya dana dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung program BUMDes dapat mempengaruhi pelaksanaan BUMDes.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menurut (Nurwega, 2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [8].

Metode penelitian ini digunakan peneliti untuk menganalisis proses dan makna pelaksanaan BUMDes agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan dan teori yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teori Edward III yaitu teori implementasi yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Lokasi dalam penelitian ini

dilakukan di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan dari penelitian [9].

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada teknik ini yang disebut informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi, tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Tanriono, 2015). Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data [10]. Serta dalam penelitian ini Sekretaris Desa Sidomojo menjadi *key informan*, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai BUMDes Makmur Jaya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dari penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapat data. Dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik penganalisisan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2016) [11].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, Pemerintah Desa Sidomojo membuat program BUMDes yang mulai didirikan pada tahun 2016. Dalam pelaksanaan program, komunikasi menjadi hal penting. Menurut Rudolf F Verderber, komunikasi memiliki fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan, membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Sedangkan fungsi pengambilan keputusan ialah memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap sesuatu pada saat tertentu [12].

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak desa yaitu berupa musyawarah dan juga sosialisasi BUMDes. Selain itu, Pemerintah Desa Sidomojo membantu untuk mensosialisasikan segala kegiatan BUMDes Makmur Jaya dengan cara tidak formal, maksudnya yaitu melalui iklan, banner dan pamflet untuk menyebarluaskan informasi jenis usaha yang dilakukan BUMDes tersebut melalui media sosial. Untuk menyampaikan teknis pengelolaan BUMDes dengan jenis usaha pengelolaan sampah, pihak pengurus BUMDes dan perangkat Desa Sidomojo melakukan musyawarah desa bersama dengan RT dan RW yang bertempat tinggal di desa tersebut. Dalam tingkat pemahaman masyarakat mengenai informasi BUMDes,

Gambar 2. Musyawarah BUMDes Desa Sidomojo
Sumber : Kantor Desa Sidomojo (2022)



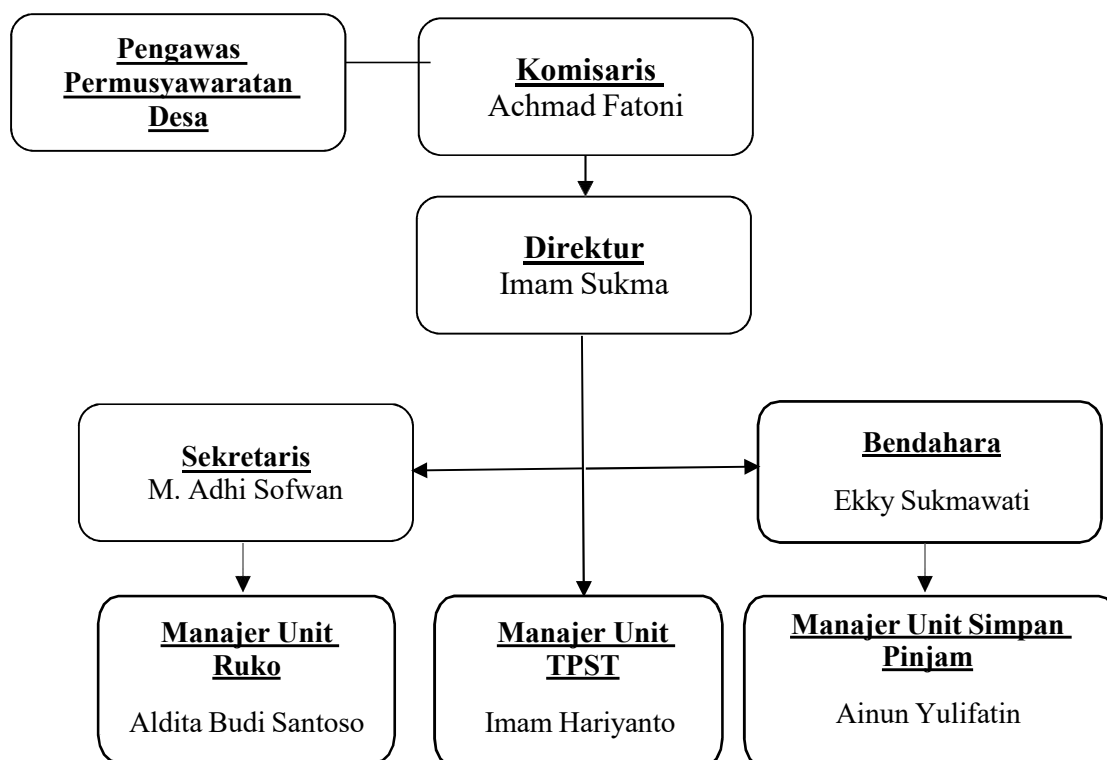
Musyawarah desa dilakukan di awal perencanaan BUMDes. Musyawarah desa tidak selalu dilakukan oleh perangkat desa, acara tersebut terakhir kali dilakukan pada 6 Januari 2022. Untuk awal adanya BUMDes masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti mengenai BUMDes. Akan tetapi, setelah berselangnya tahun, masyarakat desa menjadi paham mengenai BUMDes dan kegiatannya. Saat ini, terdapat 7 ruko, diawal BUMDes ruko-ruko tersebut sepi penyewa. Untuk saat ini, mulai tersisa 1 ruko. Tetapi, rata-rata dari penyewa ruko tidak bertahan lama untuk melakukan usaha di tempat-tempat tersebut. Serta, dalam proses kegiatan

BUMDes ini, belum ada keterlibatan dari pemuda desa seperti karang taruna dan juga ibu-ibu PKK Desa Sidomojo.

Implementasi program BUMDes di Desa Sidomojo secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari berjalannya program-program utama BUMDes secara baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki. Berdasarkan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan BUMDes yaitu, meningkatkan perekonomian Desa Sidomojo melalui kegiatan usaha BUMDes dan meningkatkan pengolahan potensi desa. Bahkan sumber daya yang dimiliki BUMDes berasal dari bantuan pemerintah dan pengguna usaha unit ruko dan TPST. Karena banyaknya volume sampah membuat unit TPST menghasilkan keuntungan yang terbilang cukup banyak. Upah yang diberikan kepada anggota unit TPST berkisar Rp. 1.800.000,- hingga Rp. 2.500.000,- (tidak sesuai dengan UMR). Hal itu tergantung dengan keuntungan yang didapat setiap bulannya. Dari upah tersebut, 10% digunakan untuk asuransi anggota TPST [13].

Sedangkan sumber daya manusia yang ada di BUMDes Sidomojo ini terbilang kurang, hal tersebut karena belum adanya ketua tetap untuk BUMDes. Dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 ketua BUMDes diangkat oleh kepala desa, setelah diangkat ketua BUMDes akan memilih pengurus pembantunya. Serta masih ada 1 (satu) unit yang belum memiliki anggota dan hanya ada kepala unit saja. Hingga saat ini pengurus BUMDes merupakan staff desa yang menjabat sebagai perangkat desa juga. Sehingga dengan adanya hal tersebut, membuat pekerjaan perangkat desa menjadi 2 (dua) kali lipat dari semestinya. Pada kenyataannya di lapangan para unit pelaksana merasa kekurangan orang untuk membantu pekerjaan mereka [14].

Gambar 3. Struktur Organisasi BUMDes Desa Sidomojo
Sumber : Hasil Oleh Penulis (2022)



Dari segi sumber daya manusianya, BUMDes di Desa Sidomojo ini masih kekurangan tenaga yaitu berupa pengurus tetap BUMDes Makmur Jaya. Karena tugas sebagai ketua BUMDes sementara ini masih dijalankan oleh Bapak Achmad Fatoni yang juga merupakan Kepala Desa Sidomojo dan masih belum ada pemilihan ketua yang baru. Lalu untuk jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes di Desa Sidomojo terdapat 3 (tiga) unit yaitu tpst, sewa ruko dan pinjaman. Tidak hanya itu, karena beberapa penyewa merasa bahwa usaha sepi peminat, mereka mulai berpikir kembali mengenai kontrak untuk perpanjangan sewa ruko serta keuntungan yang didapat setiap harinya tidak menentu. Karena itu, beberapa dari penyewa ruko terkadang tidak beroperasi atau tidak berjualan untuk mengumpulkan modal kembali agar dapat membeli kebutuhan usaha mereka.

Selain itu, perekrutan pengurus BUMDes harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa telah mendapat dana dari APBN sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu, setiap desa akan menerima dana sedemikian banyak dari pemerintah pusat secara cuma-cuma yang harus dikelola oleh desa penerima dana tersebut.

Gambar 4. Laporan Neraca BUMDes di Desa Sidomojo Tahun 2021

Sumber : Kantor Desa Sidomojo (2022)

AKUN	NAMA AKUN	PINJAMAN	TPS 3R	UMKM	KONSOLIDASI
2000	KEWAJIBAN				
2100	KEWAJIBAN LANCAR				
2111	Utang Dagang	-	-	-	-
2121	Utang Bank	-	-	-	-
2131	Utang Gaji	-	-	-	-
2141	Utang Pajak	663,420	-	-	663,420
2151	Utang Jangka Pendek Lainnya	25,724,800	27,410,000	3,655,000	56,789,800
2200	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2211	Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
3000	EKUITAS				
3111	Modal Desa	170,000,000	55,000,000	-	225,000,000
3121	Hibah	90,000,000	-	-	90,000,000
3131	Cadangan	55,528,601	-	-	55,528,601
3112	Modal Unit TPS 3R	(55,000,000)	-	-	(55,000,000)
3113	Modal Unit UMKM	-	-	-	-
3200	LABA USAHA				
3211	Laba Belum Dibagi	18,643,950	-	-	18,643,950
3212	Laba Tahun Berjalan	36,964,500	973,894	4,388,800	42,327,194
TOTAL		342,525,271	83,383,894	8,043,800	433,952,965

Dana yang diberikan kepada desa tersebut digunakan untuk permodalan, dan selebihnya digunakan sebagai dana perputaran dari program pemerintah. Modal untuk usaha sekitar Rp. 70.000.000,-. Laba total keseluruhan sebesar Rp. 42.237.194,- di tahun 2021. Tentunya keuntungan tersebut didapat dari usaha-usaha yang saat ini dijalankan oleh BUMDes Makmur Jaya yang ada di Desa Sidomojo yaitu persewaan ruko, tpst, serta simpan pinjam. Dari ketiga usaha yang dimiliki BUMDes, masing-masing memiliki keuntungan tersendiri setiap tahunnya.

Tabel 3. Saldo Keuntungan BUMDes Desa Sidomojo Tahun 2021
Sumber : Hasil Oleh Penulis (2022)

Modal	Jenis Usaha	Laba/Keuntungan
Rp. 70.000.000,-	Unit TPST	Rp 49.470.606,-
	Unit Ruko	Rp 28.111.200,-
	Unit Pinjaman	Rp. 17.787.000,-

Berdasarkan tabel 3, keuntungan dari sewa ruko sendiri mencapai Rp 49.470.606,-. Per 31 Desember 2021, yang berarti setiap bulan keuntungan mencapai 4 juta pada tahun 2021. Selain itu, ada unit usaha TPST yaitu Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang membantu masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga secara sembarangan.

Hingga saat ini, sikap yang diberikan oleh pengurus BUMDes kepada pengguna jasa usaha BUMDes sudah cukup baik dalam memberikan pemahaman terkait usaha yang dijalankan. Meskipun dalam sikap penyediaan layanan fasilitas masih belum cukup baik. Selain itu, pengurus BUMDes juga menyampaikan permasalahan keuangan melalui laporan neraca keuangan disaat musyawarah desa berlangsung. Hal itu disampaikan sendiri oleh Bendahara BUMDes dan juga Ketua BUMDes. Meskipun pengurus BUMDes sudah berusaha untuk menjalankan sesuai dengan SOP yang ada, pengurus BUMDes Makmur Jaya berusaha untuk terus melakukan sosialisasi.

Dengan keadaan pengurus BUMDes saat ini, perlu adanya restrukturisasi karena kurang lengkapnya anggota pengurus BUMDes. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi berjalannya kegiatan BUMDes. Serta kurang lengkapnya pengurus BUMDes, membuat pekerjaan menjadi lebih banyak. Dan kurangnya anggota BUMDes membuat aktivitas menjadi terhambat karena tugas yang diberikan tidak setara dengan jumlah anggota BUMDes yang sedikit.

Dalam pelaksanaan program tersebut tentunya memiliki kendala dan tidak dapat dipungkiri kendala tersebut menghambat penerapan program sidoarjo bersih dan hijau. Dimana tentunya kendala tersebut memberikan dampak dalam memicu berhentinya program.

1. Sarana dan Prasarana BUMDes

Dapat dipahami bahwa mengenai faktor penghambat yang terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi kendala terhadap keterbatasan biaya BUMDes yang masih kurang dan belum tersedianya sarana dan prasarana terkait dengan BUMDes sehingga dapat menghambat jalannya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sidomojo. Dalam artian semua kompetensi sumber daya manusia, fasilitas dan pendanaan tersebut terbilang masih sangat minim sehingga nantinya berakibat pada hambatan dalam pengembangan program BUMDes kedepannya.

2. Virus Covid

Dikarenakan turunnya surat edaran larangan berkerumun, kegiatan masyarakat juga semakin terbatas. Hal itu menjadi penghambat bagi program BUMDes. Karena dengan virus covid-19 tersebut, pemerintah Desa Sidomojo tidak dapat melakukan sosialisasi terkait kegiatan BUMDes lagi. Serta mengurangi aktivitas masyarakat dan pengurus BUMDes Desa Sidomojo untuk melakukan musyawarah desa.

3. Kurang Lengkapnya Pengurus BUMDes

Kurangnya pengurus BUMDes menjadi masalah utama. Hal itu dikarenakan tidak adanya pengurus BUMDes tetap yang dipilih dari masyarakat. Sehingga, pekerjaan menjadi bertambah

dan memberatkan pihak perangkat desa yang saat ini menjabat sebagai pengurus BUMDes. Karena seharusnya pengurus BUMDes dipilih dari masyarakat Desa Sidomojo itu sendiri.

Selain adanya kendala dalam pelaksanaan program BUMDes ini, masih terdapat dukungan dari aktor-aktor terkait program ini.

1. Dukungan Dari Pemerintah Desa

Dalam musyawarah desa tersebut, pengurus BUMDes akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dan mengevaluasi terkait pengelolaan BUMDes. Selain itu, Pemerintah Desa Sidomojo juga membantu untuk mensosialisasikan dan juga mempromosikan usaha BUMDes melalui media iklan, banner, pamflet, poster ataupun media sosial lainnya

2. Dukungan Masyarakat Desa Sidomojo

Secara umum partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi yang diberikannya baik yang nyata maupun yang abstrak. Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga, keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi tidak nyata (abstrak) adalah partisipasi buah pikiran, usulan dan saran serta pengambilan keputusan. Hal penting dalam melaksanakan kegiatan desa yaitu keikutsertaan atau partisipasi masyarakat desa. Dalam hal kemauan dan keikutsertaan masyarakat yang dimana dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi poin utama dalam keberhasilan kegiatan tersebut. Pengurus BUMDes memberikan modal melalui pinjaman dan masyarakat terus memanfaatkan dengan menggunakan pinjaman untuk menjalankan usaha mereka yang nantinya kedua belah pihak akansama-sama merasa diuntungkan [15].

VII. SIMPULAN

Pemerintah Desa Sidomojo mensosialisasikan segala kegiatan BUMDes Makmur Jaya melalui iklan, banner dan pamflet untuk menyebarluaskan informasi jenis usaha yang dilakukan BUMDes tersebut. Untuk menyampaikan teknis pengelolaan BUMDes dengan jenis usaha pengelolaan sampah, pihak pengurus BUMDes dan perangkat Desa Sidomojo melakukan musyawarah desa bersama dengan RT dan RW yang bertempat tinggal di desa Sidomojo. Awal pembentukan BUMDes, masyarakat belum terlalu paham dengan kegiatannya. Dalam pelaksanaan BUMDes Sidomojo ini bantuan dana yang diberikan masih minim serta upah dari gaji anggota TPST tidak sesuai dengan UMR. Hingga saat ini, sikap yang diberikan oleh pengurus BUMDes kepada pengguna jasa usaha BUMDes sudah cukup baik dalam memberikan pemahaman terkait usaha yang dijalankan. Meskipun dalam sikap penyediaan layanan fasilitas masih belum cukup baik.

Dengan keadaan pengurus BUMDes saat ini, perlu adanya restrukturisasi karena kurangnya anggota pengurus BUMDes. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi berjalannya kegiatan BUMDes. Serta kurang lengkapnya pengurus BUMDes, membuat pekerjaan menjadi lebih banyak. Dan kurangnya anggota BUMDes membuat aktivitas menjadi terhambat karena tugas yang diberikan tidak setara dengan jumlah anggota BUMDes yang sedikit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga saya, Pemerintah Desa Sidomojo dan Masyarakat Desa Sidomojo, Bapak/Ibu dosen dan staff Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Serta untuk kedua orang tua saya serta rekan-rekan yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan hingga tugas akhir ini selesai

REFERENSI

- [1] UU, “Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes,” 2014. *[Online]*
- [2] Suparji. 2019. Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milih Desa). Jakarta Selatan: UAI. Retrieved Oktober, 25, 2022 from: https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/pedoman-tata-kelola-bundes_fix.pdf
- [3] Amirya, Mirna. 2021. Peran BUMDes Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi desa. Retrieved Oktober 25, 2022, from iaijawatimur.or.id : <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21>
- [4] Desa, D. P. 2020. Data Badan Usaha Milik Desa . Retrieved Oktober 23, 2022 Data Desa Center: <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/>
- [5] Wijaya & Sari. (2019). Encouraging Collaborative Governance un Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Management in Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 9(2). Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/11763>
- [6] UU, “Nomor 15 Tahun 2019 mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes,” 2019. *[Online]*
- [7] Arista, V.D. (2022). Tahun Ini Jumlah BUMDes di Sidoarjo Naik Jadi 237. Retrieved from radarsidoarjo : <https://radarsidoarjo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/09/03/2022/tahun-ini-jumlah-bumdes-di-sidoarjo-ditargetkan-naik-jadi-237/>
- [8] Nurwega. “ Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif,” 2015. *[Online]*
- [9] Edward III. (1980). Implementation Public Policy. Washington DC : Congresional. Quarter Press. Jones, Charles O., 1991. Pengantar Kebijakan Publik.
- [10] Moleong, Lexy J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakary
- [11] Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- [12] Kristiani, Murni. 2021. Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli. Retrieved Oktober 25, 2022, from kemdikbud.go.id : <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=5337>
- [13] Perdes, “Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan BUMDes yaitu, meningkatkan perekonomian Desa Sidomojo melalui kegiatan usaha BUMDes dan meningkatkan pengolahan potensi desa,” 2013. *[Online]*
- [14] Permendagri, “Nomor 39 Tahun 2010 ketua BUMDes diangkat oleh kepala desa, setelah diangkat ketua BUMDes akan memilih pengurus pembantunya,” 2010. *[Online]*
- [15] Hidayati, Rohmah. (2016). Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Retrieved from semantichscholar : <https://www.semanticscholar.org/paper/Hubungan-Partisipasi-Masyarakat-Terhadap-Badan-Desa-Hidayati/b0ea36567fc190bae33a05ed7d54f87115dcaef9>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

